

**MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI  
PENGEMBANGAN UMKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA  
UNIT WAY HALIM**

**(Laporan Akhir)**



**Oleh  
ANDIKA SETIA**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WAY HALIM**

**Oleh  
Andika Setia**

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu kredit yang disalurkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada pelaku UMKM yang usahanya sudah berjalan namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran KUR Mikro pada PT BRI Unit Way Halim. Metode penulisan Laporan Akhir ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data deskriptif dengan pengumpulan data kepustakaan serta studi lapangan yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari.

Berdasarkan dari penulisan ini, bahwa dalam pemberian KUR melalui beberapa prosedur dimulai dari permohonan pinjaman, pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat, survey tempat, analisis kelayakan usaha, hingga pencairan pinjaman. Dengan adanya KUR ini sangat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi masalah permodalan dan dengan persyaratan yang mudah dan *Margin* yang rendah membuat kredit ini banyak diminati oleh masyarakat.

Kata kunci : Mekanisme, KUR, UMKM

**HALAMAN JUDUL**

**MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI  
PENGEMBANGAN UMKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA  
UNIT WAY HALIM  
OLEH  
ANDIKA SETIA**

**Laporan Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md)  
KEUANGAN PERBANKAN**

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan  
Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**



Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PENYALURAN KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN  
UMKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA  
UNIT WAY HALIM**

Nama Mahasiswa : **Andika Setia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001081029**

Program Studi : **DIII Keuangan dan Perbankan**


Jurusan : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

**MENYETUJUI**

Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan

  
**Aripin Ahmad, S.E., M.Si.**  
NIP 19600105 198603 1 005

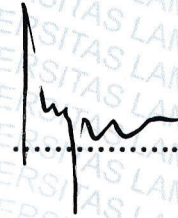
  
**Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.**  
NIP 19770324 200812 2 001



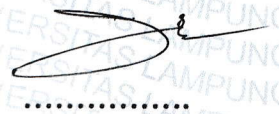
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

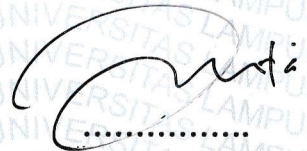
Ketua Penguji : **Aripin Ahmad, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Yuningsih, S.E., M.M**



Sekretaris : **Mutiasari Nur Wulan, S.A.B,M.M**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **13 Juli 2023**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Setia  
Program Studi : Diploma III Keuangan dan Perbankan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul:

### **Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim**

Adalah hasil karya saya sendiri

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Laporan Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dengan rangkaian kalimat atau simbol dengan saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Laporan Akhir yang saya ajukan ini. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023  
Yang Memberi Pernyataan



ANDIKA SETIA  
2001081006

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis yang bernama Andika Setia dilahirkan di Lampung Barat pada Tanggal 31 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Barzawan dan Ibu Zarti Siswita.

Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2007 di SD Negeri 2 Way Empulau Ulu dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2019.

Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung. Pada tahun 2023 Penulis melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) selama 40 hari kerja sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 10 Februari 2023 di Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Way Halim, Bandar Lampung.

## MOTTO

كيف ا خاف من الفقر و انا عبد الغير

“Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedang aku adalah hamba dari  
Yang Maha Kaya”

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.”

**(Imam Al Ghazali)**

“Hiduplah Kamu Seperti Akan Mati Besok, Dan Berbahagialah Seperti Akan  
Hidup Selamanya”

**(B.J. Habibie)**



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur ku panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Karunianya, akhirnya tugas Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

**Karya kecil ini saya persembahkan kepada :**

**Kedua Orang Tua Tercinta**

**Ayahanda Barzawan dan Ibunda Zarti Siswita**

Sebagai tanda hormat dan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan mental, materi, semangat, kasih sayang, serta doa yang tiada hentinya, yang menjadi alasan terus melangkah sampai di titik ini hingga akhirnya Laporan Akhir ini dapat terselesaikan. Semoga Allah subhanahu wata'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kemudahan rezeki, keberkahan umur dan lindungan-Nya disetiap langkah yang diambil. Terimakasih bak... Terimakasih mak...

**Kakak dan Adik Tersayang**

Yang selalu menyemangati dan mendukung setiap keputusan yang diambil, serta selalu memberi keceriaan dalam hidupku.

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul “**Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim**”. Laporan Akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung.

Penulisan Laporan Akhir ini banyak rintangan yang penulis dapatkan, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Lampung.
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Lampung, sekaligus dosen pembimbing Laporan Akhir dan ketua penguji, yang senantiasa memberikan bantuan, bimbingan, serta pengarahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
3. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Lampung.
5. Ibu Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Yuningsih, S.E., M.M Selaku Penguji Utama.
7. Ibu Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M Selaku Sekertaris Penguji.

8. Bapak Nasirudin selaku staf sekretariat Program Diploma III Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Lampung.
9. Bapak Zainal Abidin selaku Kepala PT BRI Unit Way Halim.
10. Seluruh Karyawan dan Staf PT BRI Unit Way Halim atas kerjasama, pengalaman, dan pembelajaran selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
11. Seluruh Dosen Manajemen Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama perkuliahan.
12. Teruntuk Aria Amelda Murti, partner yang selalu mendukung, membantu, dan direpotkan dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
13. Sahabat-sahabat peneliti Clara Natalia dan Reza ary serta sahabat-sahabat seperjuangan Resti, Haidar, hadid, Niko, Satria dan teman-teman Diploma III Keuangan angkatan 2020, terimakasih atas kerjasama, pengalaman, dan pembelajaran yang luar biasa selama masa perkuliahan.

Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segenap kerendahan hati dan keterbatasan kemampuan, penulis meyakini bahwa Laporan Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Besar harapan semoga Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

**Bandar Lampung, 06 Juni 2023**  
**Penulis**

**Andika setia**



## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir .....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Mekanisme .....	7
2.2. Pengertian Bank .....	8
2.3. Pengertian Kredit .....	9
2.3.1 Unsur-unsur Kredit .....	10
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit .....	11
2.3.3 Jenis-Jenis Kredit .....	13
2.4 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	15
2.4.1 Tujuan Kredit Usaha Rakyat .....	16
2.4.2 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat .....	17
2.4.3 Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 .....	17

2.5. Pengertian UMKM .....	21
2.5.1 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	24
2.5.2 Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	25
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.4 Objek Kerja Praktik .....	29
3.5 Gambaran Umum Perusahaan .....	29
3.5.1 Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ....	29
3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Mekanisme Penyaluran KUR di PT BRI Unit Way Halim .....	39
4.2 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan KUR .....	41
4.3 Kendala Penyaluran KUR .....	44
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	45
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	49
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

TABEL 1.1 Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2021.....3



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Data Jumlah Nasabah KUR BRI Unit Way Halim.....	4
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT BRI Unit Way Halim.....	32
Gambar 4.1 Plafond Pinjaman KUR Mikro.....	40
Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan KUR.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	53
Lampiran 2 Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan.....	54
Lampiran 3 Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan.....	56
Lampiran 4 Form Bimbingan Laporan Akhir.....	57
Lampiran 5 Penilaian Pembimbing Lapangan.....	58
Lampiran 6 Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan.....	59
Lampiran 7 Jurnal Aktivitas Peserta Praktik Kerja Lapangan.....	60





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini terus meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Sektor utama yang mempengaruhi perekonomian saat ini salah satunya adalah perbankan. Perbankan adalah Lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan menurut undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah menyalurkan dana bagi kegiatan ekonomi, yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan, atau badan usaha. Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berbagai macam jenis produk yang dikeluarkan oleh Bank guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa kita sadari tidak semua masyarakat bisa menikmati produk atau layanan tersebut dikarenakan adanya beberapa persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh beberapa lapisan masyarakat. Seperti contohnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), salah satu produk jasa keuangan Bank adalah kredit usaha rakyat (KUR) yaitu kredit pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja yang

didukung jenis usaha yang meliputi bidang perdagangan, pertanian, komunikasi, kuliner dan lain-lain.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Merupakan Bank yang cukup berperan besar untuk memberikan pinjaman atau kredit khususnya pada usaha kecil dan menengah, sesuai dengan perannya Bank ikut serta mempercepat perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. BRI Unit Way Halim memiliki beberapa jenis kredit, salah satunya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR adalah program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi. Program KUR ini juga diharapkan bisa membantu pelaku UMKM yang selama ini memiliki kendala dalam masalah syarat pengajuan kredit, dan para pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman dengan mudah dan tanpa syarat syarat yang memberatkan.

Tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah kembali menyalurkan program KUR bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka menjaga praktik *Good Corporate*

*Governance* dalam penyaluran KUR, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha terpenting, yang jumlahnya terus bertambah lebih banyak dibandingkan industri usaha yang berskala besar dan memiliki kelebihan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kemenkop UKM) di Indonesia tembus 8,71 juta unit jenis usaha pada tahun 2022, UMKM juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Namun, kurangnya pendanaan membuat para pelaku UMKM sering mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya.

Tahun 2021, terhitung hingga bulan Juni realisasi dana KUR yang diberikan kepada 4 Bank BUMN mencapai 81,4 Triliun Rupiah. Secara rinci realisasi KUR tahun 2021 di jelaskan pada Tabel 1.1

**TABEL 1.1**  
**Realisasi Penyaluran KUR 2021**

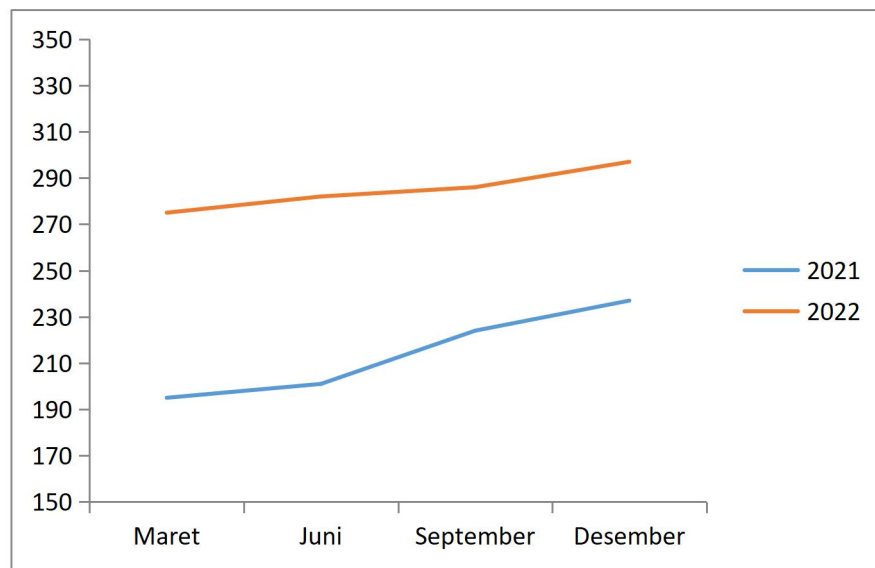
No	Penyalur	Total Penyaluran KUR	
		Plafon (Rupiah)	Jumlah debitur (Orang)
1	PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)	58.397.886.002.269	2.093.475
2	PT Bank Mandiri (Persero)	13.102.218.299.000	135.538
3	PT Bank Negara Indonesia(Persero)	9.901.483.435.120	100.326
4	PTBank Tabungan Negara(Persero)	61.805.100.000	222
5	PT Bank Central Asia	77.495.844.077	569
6	PT Bank MayBank Indonesia	11.150.000.000	24
7	PT Bank Sinarmas	240.591.964.500	852
8	Bank Permata	3.026.000.000	13
9	PT BRI agroniaga	13.061.251.000	97
10	PT Bank Mandiri Taspen	13.727.000.000	342

Sumber: Website Kredit Usaha Rakyat tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank yang paling banyak menerima dana KUR dari pemerintah yaitu sebesar 58 Triliun, dengan 2.093.475 jumlah debitur.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada 04 Januari hingga 10 februari 2023 di BRI Unit Way Halim, diperoleh data sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Data Jumlah Nasabah KUR BRI Unit Way Halim**  
**Periode 2021-2022**



Sumber : PT BRI Unit Way Halim

Berdasarkan data jumlah nasabah KUR BRI Unit Way Halim diatas dapat dilihat bahwa, jumlah nasabah KUR di BRI Unit Way Halim terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari periode 2021 hingga periode 2022, kenaikan jumlah nasabah ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya persyaratan yang lebih mudah, suku bunga yang kompetitif, jaringan BRI yang luas, dan lainnya.

Dalam setiap perumusan Kebijakan program tentu, di iringi dengan suatu mekanisme agar supaya program tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan efektif,serta sesuai tepat sasaran.Berkaitan dengan uraian dan data pada tabel 1.1 maka dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi**

## **Pengembangan UMKM Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Way Halim”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim?
2. Bagaimana peran Kredit Usaha Rakyat bagi pengembangan UMKM ?

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dan data yang lengkap dan objektif yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil, namun secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan UMKM yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Way Halim.
2. Untuk mengetahui peran Kredit Usaha Rakyat bagi pengembangan UMKM

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis laporan akhir ini yaitu:

1. Bagi Perusahaan  
Sebagai bahan Masukan atau sumbangan pemikiran bagi PT BRI Kantor Unit Way Halim dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan dalam penyaluran kredit.
2. Bagi Penulis
  - a) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai produk-produk kredit BRI khususnya KUR.
  - b) Mengetahui mekanisme dan prosedur pemberian kredit kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI Unit Way Halim.

### 3. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan serta bisa dijadikan sebagai referensi dalam menyusun Laporan Akhir khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata *mechane* Yang berarti (sebuah instrumen, angkat beban, peralatan, dan perangkat) dan kata *mechos* yang artinya (sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi) (Galileo, 2018:117). Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan, serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

Selain itu mekanisme adalah teori yang menyatakan setiap gejala alam yang memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak. mekanisme dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang biasa dipakai untuk menjelaskan cara kerja mesin-mesin tanpa menggunakan intelegensi sebagai sebuah sebab atau prinsip kerja.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa, mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan hasil yang maksimal sehingga dapat tercapai sebuah tujuan yang di inginkan.

Adapun dalam sebuah penyaluran kredit tentu memiliki mekanisme. Menurut (Setyawan, 2017;14) mekanisme pemberian kredit secara umum yaitu sebagai berikut:

a. Permohonan kredit

Tahap pertama dari prosedur pemberian kredit adalah adanya pengajuan surat permohonan kredit oleh calon debitur yang diajukan secara tertulis.

b. Pengumpulan data

Setelah surat permohonan kredit diterima dari calon debitur maka akan registrasi pada buku permohonan kredit.

c. Analisa kredit

Dalam analisa kredit diperlukan adanya data-data tersebut diatas data lain yang diperlukan akan dilakukan oleh *Account Officer* (AO). Adapun data kredit pada umumnya yang dibutuhkan oleh pihak Bank terdiri dari beberapa aspek yakni hukum, manajemen, sosial, ekonomi, pemasaran, teknik produksi, jaminan dan keuangan. Data tersebut dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi.

d. Keputusan dan persetujuan kredit

Setelah kredit diputuskan disetujui, ditolak, atau ditangguhkan maka segera dibuatkan surat penegasan atau surat pemberitahuan kepada pemohon.

e. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit yaitu setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank yang dalam prakteknya berupa pembayaran atau pemindah bukuan atas rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

## 2.2. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan guna menerima simpanan dan meminjamkan uang. Kata Bank berasal dari bahasa italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Menurut (Kasmir, 2008;), Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

Kemudian menurut (Hasibuan, 2005;), Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Fungsi utama Bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat, serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan utama yaitu mendukung dan ikut serta dalam pembangunan nasional, dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya yaitu :

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa simpanan tabungan, giro, deposito, dan atau bentuk lainnya.
2. Menyalurkan dana (*Lending*) ke masyarakat, Bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman). Jenis kredit yang disediakan oleh bank diantaranya adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kreditan pemilikan rumah dan sebagainya.
3. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya seperti, pengiriman uang (transfer), menyediakan uang elektronik dan lain sebagainya.

### **2.3. Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit juga disebut sebagai penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima

kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Adapun menurut (Karmila, 2010:2), Pemberi kredit disebut kreditur, sedangkan penerima kredit disebut debitur.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kredit dapat diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan melalui kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam, dimana keduanya sepakat sesuai dengan perjanjian yang mencakup jangka waktu beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan bersama.

### **2.3.1 Unsur-unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut (Kasmir, 2008;) yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Suatu keyakinan pemberian suatu kredit Bank bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank kepada calon debitur, karena sebelum dana tersebut diberikan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan Bagaimana situasi dan kondisi calon debitur. Sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi Bank maupun debitur.

#### **2. Kesepakatan**

Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan, dalam suatu perjanjian yang mencantumkan masing-masing hak dan kewajibannya, dan kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah yang selanjutnya disaksikan oleh notaris.

3. Jangka waktu  
Setiap kredit yang diberikan, pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Risiko  
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit, akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet, semakin panjang suatu kredit semakin besar pula risikonya. Demikian pula sebaliknya risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa  
Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan Komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit Menurut ketentuan yang berlaku.

### **2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit**

#### **1. Tujuan**

Menurut (Kasmir,2010;100) adapun tujuan pemberian suatu kredit adalah:

##### a) Mencari keuntungan

Bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa, dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan jasa Bank tersebut.

b) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami defisit anggaran (kekurangan dana) baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c) Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah

- 1) Satu penerimaan pajak.
- 2) Membuka kesempatan kerja.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 4) Meningkatkan devisa negara.

## 2. Fungsi

Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut :  
(Kasmir, 2014;)

a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadikan berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya

c) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh Bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.



d) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperluas arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik pula terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika Sebuah kredit diberikan untuk membangun suatu perusahaan maka perusahaan tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja.

g) Untuk meningkatkan keinginan berwirausaha

bagi penerima kredit untuk akan dapat meningkatkan ke keinginan berwirausaha apalagi bagi nasabah yang memang modalnya hanya sedikit atau pas-pasan.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Kategorisasi kredit secara umum dapat dilihat dari berbagai segi menurut (Kasmir, 2014;) yaitu :

**A.** Jenis kredit Dilihat dari tujuan penggunaannya:

1. Kredit Investasi

kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru.

2. Kredit Modal Kerja

kredit modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.

**B.** Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya

1. Kredit Konsumtif

kegiatan kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi saat ini biasanya di pakai untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil

2. Kredit Produktif

kegiatan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

3. Kredit Perdagangan

kegiatan kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

C. Jenis kredit dilihat dari sektor usahanya

1. Kredit Pertanian

kegiatan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

2. Kredit Peternakan

kegiatan kredit yang diberikan kepada sektor peternakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Kredit Industri

kegiatan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil menengah dan besar.

4. Kredit Pendidikan

kegiatan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

5. Kredit Perumahan

kegiatan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian serta merenovasi rumah.

6. Kredit profesi

kegiatan kredit yang diberikan sesuai dengan profesi nasabah seperti guru.

D. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya

1. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang yaitu, kredit yang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lebih.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah yaitu, kredit yang waktu pengembaliannya berkisaran antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

3. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek yaitu, kredit yang waktu pengembaliannya maksimal satu tahun.

E. Kredit berdasarkan jaminannya

1. Kredit dengan jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang hanya diberikan apabila ada jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk surat berharga dan lainnya.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang tidak menggunakan jaminan barang atau surat berharga. Kredit ini diberikan hanya melihat dari usaha milik nasabah, dan loyalitas nasabah selama berhubungan dengan Bank atau pihak lainnya.

#### **2.4 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 pasal 1 ayat (2), KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah produk Bank yang disalurkan kepada UMKM dalam bentuk pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI). Terdapat 2 macam pinjaman KUR yaitu pinjaman KUR mikro dan kecil.

Pinjaman KUR mikro dengan plafon pinjaman dimulai dari Rp.1.000.000,- sampai dengan batas pinjaman maksimal Rp.50.000.000,- untuk dengan

pembayaran tenor maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan maksimal 5 tahun untuk Kredit Investasi (KI). Sedangkan untuk pinjaman KUR kecil yaitu dengan plafon pinjaman dimulai dari Rp.50.000.000,- sampai dengan pinjaman maksimal Rp.500.000.000,- dengan pembayaran tenor maksimal 4 tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan maksimal 5 tahun untuk Kredit Investasi (KI).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada pelaku UMKM yang usahanya sudah berjalan namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.

#### **2.4.1 Tujuan Kredit Usaha Rakyat**

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan serta pengentasan rakyat dari garis kemiskinan.

Adapun tujuan KUR dari segi perbankan sebagai pelaksana adalah :

1. Meningkatkan pembiayaan modal kerja kepada UMKM dan koperasi Bank.
2. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.

Bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka

penanggulangan/pengentasan kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Adapun keunggulan dari produk pinjaman KUR ini adalah sebagai berikut :

- a. Suku bunga rendah, yaitu hanya sebesar 6 % saja.
- b. Plafon tinggi, debitur bisa meminjam sampai dengan 500 juta rupiah.
- c. Syarat pengajuan pinjaman mudah.

#### **2.4.2 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat**

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat disalurkan oleh Bank BRI kepada calon nasabah dengan syarat sebagai berikut:

1. Individu (pribadi) dengan kepemilikan usaha layak dan produktif.
2. Usaha telah aktif berjalan minimal 6 bulan.
3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali pinjaman konsumtif seperti kartu kredit, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), atau KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
4. Mempersiapkan dokumen berupa e-KTP, KK (Kartu Keluarga), dan surat izin usaha.
5. Memilih jenis pinjaman meliputi KMK (Kredit Modal Kerja) dengan pembayaran 3 tahun atau KI (Kredit Investasi) selama maksimum 5 tahun.
6. Bersedia membayar suku bunga efektif senilai 6% per tahun.

#### **2.4.3 Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021**

Pada tahun 2021, Kebijakan Program KUR merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenko 3 Tahun 2021 tentang Perlakuan Khusus KUR di masa Pandemi Covid-19, Komite Kebijakan bagi Pembiayaan UMKM sebagai pengambil keputusan menetapkan akumulasi plafon pinjaman menjadi Rp 253 Triliun dari yang seharusnya hanya Rp 220 Triliun dan memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin kepada debitur KUR yang terdampak usahanya sampai dengan 31

Desember 2021. Kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon juga tetap diberikan kepada debitur.

Kemudian sesuai dengan arahan presiden tentang peningkatan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak boleh adanya agunan bagi kredit UMKM dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengeluarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR. Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut:

- a. KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut.
- b. Kesesuaian jumlah pembiayaan/kredit yang diterima sesuai dengan nilai akad yang ditandatangani di semua skema KUR, sehingga tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk apapun.
- c. Ketentuan komoditas pada KUR khusus diperluas, KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
- d. Ketentuan terkait calon Penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan diubah menjadi sebagai berikut:
  1. Calon Penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
    - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
    - b. Kredit kepemilikan rumah;



- c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
  - d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
  - e. Kartu kredit;
  - f. Kredit Resi Gudang; dan/atau
  - g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian kredit secara bersamaan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR
  3. Pemberian Kredit dapat dilakukan bersamaan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- e. Calon Penerima KUR Kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah kembali menyalurkan program KUR bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. Memperhatikan kebutuhan masyarakat, KUR pada tahun 2021 hadir dengan 5 skema yang terdiri dari:

a. KUR Super Mikro

Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib

mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

b. KUR Mikro

Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro sebelumnya telah lunas.

c. KUR Kecil

Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

d. KUR Khusus

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Adapun KUR Khusus ini diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.

e. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dan peserta magang di luar negeri.

## **2.5. Pengertian UMKM**

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengertian UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kriteria UMKM Kriteria UMKM juga dijelaskan lewat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penjelasan soal kriteria UMKM tercantum dalam Bab V Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

## 1. Usaha Mikro

- a. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa tergolong sebagai usaha mikro UMKM bila memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan) dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta.
- b. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- c. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- d. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- e. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- f. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- g. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- h. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-Bank, dan tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- i. Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.

## 2. Usaha Kecil

- a. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Selain itu, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

- b. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- c. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- d. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- e. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- f. Sudah membuat neraca usaha.
- g. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal, dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.
- h. Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.

### 3. Usaha Menengah

- a. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Selain itu menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.
- b. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- c. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- d. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- e. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- f. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- g. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
- h. Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan

### 2.5.1 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM dibagi kedalam beberapa perspektif yaitu:

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri, antara lain:

- 1) Kualitasnya belum standar. Sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai sehingga produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* dan standar kualitasnya beragam.
- 2) Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.

- 3) Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
- 4) Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- 5) Bahan baku kurang terstandar. Hal ini dikarenakan bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- 6) Kontinuitas produk tidak terjamin, dan kurang sempurna. Hal ini dikarenakan produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya

### **2.5.2 Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting UMKM:

- 1) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- 2) Pada saat krisis moneter terjadi di tahun 1998 dan 2008-2009, 96% UMKM tetap bertahan dari guncangan krisis.
- 3) UMKM membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
- 4) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

- 5) UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Selain itu, beberapa kontribusi positif UMKM yang tidak dapat dipandang sebelah mata, yaitu:

- 1) Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan (99,9%).
- 2) Menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp4.869,57 Triliun), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun.
- 3) Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp166,63 triliun) dari total ekspor nasional.
- 4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33% (Rp830,9 triliun).
- 5) Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. *Multiplier effect*-nya tinggi. Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Wadah untuk penciptaan wirausaha baru.

Dengan demikian, bisnis UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia, karena:

- 1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- 2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
- 3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.



## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan strategi riset yang digunakan oleh penulis untuk mengintegrasikan secara menyeluruh, secara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penulis. Dalam rangka penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial (Lexy Moleong, 2011:9).

Data deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai Mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM pada PT BRI Unit Way Halim. Pada pendekatan kualitatif ini proses penelitian ditekankan pada pemahaman, pemikiran serta persepsi penulis.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian penulis yaitu pada PT BRI Unit Way Halim. Dalam penelitian ini data diperoleh dari para pegawai, data tersebut didapatkan dari pengamatan dan wawancara. Penulis melakukan pengamatan dan wawancara untuk mengetahui secara mendalam dan luas mengenai

Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Pada PT BRI Kantor Unit Way Halim.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari PT BRI Unit Way Halim, tetapi diperoleh melalui data-data yang sudah dipublikasikan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah metode yang berhubungan langsung pada PT BRI unit Way Halim untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan cara :

a. Metode pengamatan (Observation)

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang terjadi di perusahaan setiap harinya pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan PKL yang telah berjalan selama 40 hari terhitung sejak 04 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 di PT BRI Unit Way Halim.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak perusahaan, khususnya kepada karyawan perusahaan yang berkaitan dengan perkreditan. Dalam hal ini bertanya kepada mantri dan customer service.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, dengan cara menggunakan dokumen yang

tersedia sebagai sumber informasi, guna mencapai tujuan yang diharapkan.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui membaca buku-buku literatur mengenai perbankan, mempelajari dan memperoleh data-data yang bersumber dari kepustakaan, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dengan membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Lokasi tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Way halim yang terletak di Jl. Kimaja No 13 Way halim, sukarama Bandar Lampung. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung selama kurang lebih 40 hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023.

### **3.5 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.5.1 Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank tertua di Indonesia yaitu sudah ada sejak jaman penjajahan berikut sejarah singkat berdirinya Bank BRI :

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en SpaarBank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Perpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas.

PT BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai tetap konsisten, yaitu dengan focus pemberian

fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUR pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

### **3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan**

#### **Visi**

Menjadi Bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

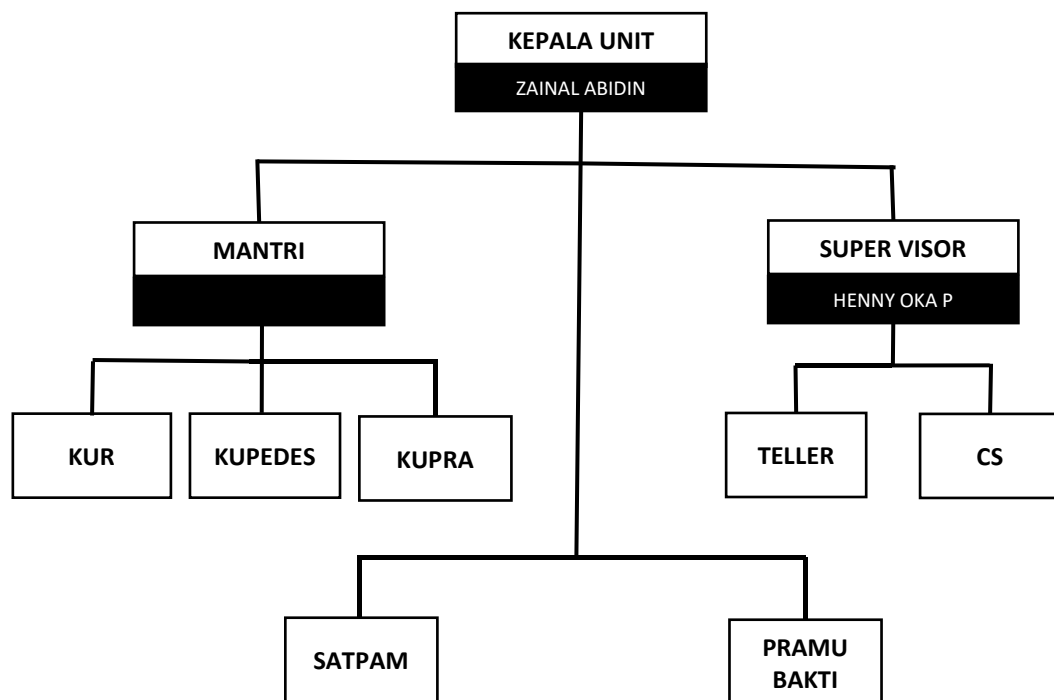
#### **Misi**

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *Good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **3.5.3 Struktur Organisasi**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Way Halim memiliki struktur organisasi dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di dalam menjalankan kegiatan perusahaan dalam melayani nasabah. Adapun struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Way Halim adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi, Tahun 2023**



Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Way Halim, 2023

### 3.5.3.1 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka wewenang dan tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Unit

Tugas Kepala Unit BRI (Ka. Unit) adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BRI Unit yang dipimpinnya.
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan kerja para petugas BRI Unit menjadi bawahannya.
- 3) Melakukan pengurusan dan penyimpanan kas BRI Unit bersama Teller.

- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme kontrol di BRI unit yang meliputi pengurusan kas, administrasi pembukuan, Registrasi, berkas-berkas, SB, logistik, dan personil.
- 5) Memutuskan permintaan pinjaman, flat bayar biaya eksploitasi, perintah pemindahbukuan dan menandatangani surat-surat. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- 6) Mengadakan hubungan dengan instansi atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas BRI unit.
- 7) Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian kerja secara periodik serta usulan kenaikan pangkat bawahannya.
- 8) Melakukan pembinaan terhadap nasabah penjamin maupun simpanan.
- 9) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka mengembangkan usaha BRI unit.
- 10) Kepala unit harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan mantri, teller, deskman, dan menggantikan dalam hal yang bersangkutan kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka mengembangkan usaha BRI unit.
- 11) Menyampaikan laporan-laporan rutin maupun insidental secara periodik dan sewaktu-waktu ke sub area unit.
- 12) Menyimpan, mengadministrasikan dan membuat surat-surat yang berklarifikasi rahasia dan sangat rahasia.

Wewenang Kepala Unit BRI (Ka. Unit) adalah sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan biaya kerugian karena kasus sesuai dengan wewenangnya
- 2) Memutus permintaan pinjaman kupedes sesuai wewenangnya.
- 3) Memflat pencairan simpanan sesuai kewenangannya.
- 4) Mengusulkan keringanan bunga kupedes sesuai kewenangannya.
- 5) Menandatangani bilyet deposito sesuai unit kewenangannya.
- 6) Memflat biaya promosi sesuai kewenangannya.
- 7) Memflat biaya eksploitasi sesuai kewenangannya.

- 8) Memegang kunci brankas.
- 9) Menandatangani surat keluar yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang ditunjukkan kepada pihak intern maupun ekstern bersama-sama dengan deskman.
- 10) Mengusulkan ke kanca hal yang berkaitan dengan :
  - a. mutasi, promosi, demosi pegawai BRI unit bawahannya.
  - b. reward dan punishment ( bonus dan hukuman jabatan).
  - c. pemenuhan kebutuhan SDM diwilayah kerjanya.
- 11) Melakukan perbuatan hukum, mengikat pihak ketiga dan menghadap dimuka pengadilan dalam rangka mewakili BRI, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan BRI unit di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan delegasi wewenang yang diberikan.

## 2. Mantri

Tugas Mantri adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisa dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan putusan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi Bank.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asset.
- 3) Memperkenalkan dan memasarkan produk BRI unit dan BRI untuk mencapai profit yang maksimal.
- 4) Mengadakan kunjungan kepada calon nasabah pinjaman dan simpanan potensial.
- 5) Melaksanakan pengendalian tunggakan dengan cara pemeriksaan setempat, menagih, serta mengusulkan langkah-langkah penyelesaian atau pengamanan pinjaman.
- 6) Menyampaikan hasil kunjungan pembinaan nasabah atau calon nasabah kepada kepala unit dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan (ekspansi)



- 7) Menatakerjakan rencana kerja, buku tournel dan buku eksploitasi kendaraan bermotor (dinas) yang digunakannya dalam rangka efesiensi dan efektifitas kerja.
- 8) Menyampaikan data-data tentang potensi dan pengembangan situasi wilayah kerja.
- 9) Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka memperlancar tugas marketing.

### 3. Supervisor

Tugas dan tanggung jawab supervisor adalah :

- 1) Menerima, meneliti, dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan pasar sasaran, guna menjamin pinjaman yang sehat menghasilkan dan menguntungkan.
- 2) Mengadministrasikan pasar sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi kepada pejabat kredit lini.
- 3) Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan/koordinator ADK atas setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring penyelesaian pemberian kredit oleh pejabat lini.
- 4) Menyiapkan kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang dan melaporkannya kepada atasan guna menjadi informasi pejabat kepada lini untuk memproses perpanjangan kredit yang akan jatuh tempo.
- 5) Mendistribusikan semua surat masuk kepada semua pejabat yang berwenang di Kanca dan unit kerja dibawahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kantor cabang.
- 6) Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas ekspedisi dalam rangka penyampaian informasi pada unit kerja lainnya.
- 7) Melayani aplikasi pembukaan rekening simpanan bagi calon nasabah BRI dan memberikan yang memuaskan para nasabah .
- 8) Meneliti kelengkapan persyaratan pembukaan rekening simpanan untuk mengamankan pihak perbankan.

- 9) Mengisi customer information file pada sistem guna menunjang kelancaran operasional.
- 10) Membuat aplikasi tambahan kas awal dan menerima uang dari kantor cabang induknya.
- 11) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkannya dengan tanda setorannya.
- 12) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterimanya.

#### 4. Teller

Tugas Teller adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk kepentingan bisnis BRI.
- 2) Memelihara citra BRI unit khususnya dan BRI umumnya untuk menjaga kepentingan bisnis BRI unit.
- 3) Mengurus kas bersama kepala unit untuk mengamankan asset Bank.
- 4) Memastikan kelancaran dan ketetapan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI.
- 5) Menyetorkan setiap kelebihan maksimal kas selama jam kerja, dan menyetorkan sssisa kas pada akhir hari ke kas induk untuk keamanan kas BRI unit.
- 6) Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada pada ruangan teller untuk kelancaran pelayanan kepada nasabah.
- 7) Memastikan kelengkapan bukti kas tunai dan OB yang berada pada pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas teller.
- 8) Membuat registrasi kas teller untuk tertib administrasi.

#### 5. Customer Service

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

- 2) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI unit guna menunjang pemasaran produk BRI.
- 3) Mengumpulkan, menyediakan dan mengolah data-data internal dan eksternal terkait pinjaman BRI unit simpanan serta jasa Bank lainnya.
- 4) Mengimplementasikan kebijakan pedoman di bidang administrasi pinjaman BRI unit simpanan serta jasa Bank lainnya sesuai ketentuan pelaksanaannya.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI unit dan simpanan serta jasa Bank lainnya.
- 6) Mengelola berkas pinjaman BRI unit beserta gunanya berkas simpanan dan jasa Bank lainnya guna memastikan kelengkapan keamanan dan tertib nya administrasi.
- 7) Mengagendakan dan mendokumentasikan surat keluar atau surat masuk sesuai bidang tugasnya untuk memastikan surat atau dokumentasi didistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari pimpinan BRI unit sesuai dengan peran dan kompetensinya guna mencapai target yang ditetapkan
- 9) Menyiapkan dokumen-dokumen dan nota kredit atau dokumen dan nota nota pembukuan lainnya untuk mendukung proses penyelesaian administrasi pinjaman BRI

## 6. Satpam

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Berusaha menjaga lingkungan kerja perbankan agar aman.
- 2) Mengamankan ruang lingkup kerja dari potensi maling, serangan dari pihak luar atau orang yang tidak bertanggung jawab pada jam kerja shiftnya.
- 3) Melindungi semua aset di lingkungan perbankan.
- 4) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua orang di lingkungan perbankan baik itu tamu atau nasabah, karyawan, atau pun pelanggan lain.

- 5) Mengawasi dan mewaspadaikan orang-orang yang dianggap membahayakan lingkungan sekitar
- 6) Berpartisipasi dalam pelayanan pelanggan seperti membukakan pintu untuk nasabah yang datang dan membutuhkan pelayanan tanpa pandang bulu, mengambil nomor antrian pelanggan, menginformasikan informasi tertentu kepada pelanggan dan sebagainya
- 7) Membantu mengarahkan pelanggan untuk menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan seperti mengarahkan pelanggan atau nasabah untuk ke customer service, pergi ke teller atau sebagainya.

#### 7. Pramubakti

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan BRI Unit guna memberikan rasa nyaman kepada nasabah yang datang.
- 2) Membantu menginput data nasabah yang baru melakukan pencairan pinjaman,
- 3) Membantu pengarsipan dokumen dan mencari dokumen yang diperlukan.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa BRI Unit Way Halim telah melaksanakan sistem pemberian KUR dengan baik, mekanisme prosedur telah ditetapkan dan dilaksanakan secara tepat sasaran dan berjalan efektif meskipun terdapat beberapa permasalahan seperti waktu pembayaran yang terlambat dan kredit macet, tetapi hal ini dapat diatasi dengan baik oleh pihak Bank. Proses pembiayaan KUR pada BRI Unit Way Halim dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya pengajuan pembiayaan, pengecekan *BI Checking*, survey, analisis hasil survey, pemberian keputusan, pencairan pembiayaan, dan pengawasan.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan KUR terdapat mekanisme prosedur yang harus dijalankan agar pemberian kredit tepat sasaran yaitu :

- 1) Tahap Pengajuan, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR dengan mengisi formulir pengajuan permohonan KUR dan membawa semua dokumen persyaratan yang sudah ditentukan.
- 2) Tahap Pemberian, bank mengecek *BI Checking* calon nasabah dan melakukan survey guna mengecek kebenaran data, serta *trade checking* sekitar lingkungan tempat tinggal calon nasabah.
- 3) Tahap Pencairan, nasabah akan diberikan dana sesuai nominal pinjamannya melalui tabungan BRI, dana pembiayaan KUR yang dikirimkan ke nasabah harus diambil sesuai jumlah nominal peminjaman setelah pembiayaan dicairkan ke rekeningnya.
- 4) Tahap Pengawasan, pihak bank akan mengunjungi tempat usaha nasabah KUR untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan.

KUR merupakan program yang tepat sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Pembiayaan KUR sangat berperan terhadap pengembangan UMKM karena dengan adanya

pembiayaan KUR, masalah permodalan yang di alami pengusaha UMKM dapat teratasi. Selain itu terdapat beberapa pelaku usaha yang dengan mendapatkan pembiayaan KUR, ia dapat mengembangkan usahanya lebih dari satu jenis.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah ditetapkan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Bagi pelaku UMKM, diharapkan untuk tidak menyalahgunakan dana KUR dengan kebutuhan konsumsi, agar pemanfaatan pembiayaan lebih efektif dan maksimal, sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
- 2) Bagi pihak Bank, diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan pembiayaan KUR agar para pelaku UMKM lebih tertarik untuk menggunakan pembiayaan ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Sidik, Jhon Fernos “Mekanisme Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Negara Indonesia KCU Bukit Tinggi,” *Akademi Keuangan Dan perbankan Pembangunan Padang*, 2019
- Dewi Anggraini Syahrir Hakim Nasution, ”Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3, 2013, h. 105.
- Galileo, 2018. *Teknologi Mekanik*. Jakarta: Grafika 27
- Hasibuan, Melayu SP. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.  
<https://bri.co.id/info-perusahaan>
- Karmila, 2010. *Kredit Bank*. Yogyakarta:KTSP.
- Kasmir, 2010.*Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Kasmir. S.E., M.M. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Edisi Ke-4 Cet, 7; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1355/KMK.05/2015 Tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, [www.KUR.ekon.go.id](http://www.KUR.ekon.go.id) pada 28 Januari 2019
- Kredit Usaha Rakyat tentang data realisasi KUR tahun 2021  
<https://KUR.ekon.go.id/>
- Kredit Usaha Rakyat, [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) pada 28 Maret 2023 pukul 10.15 WIB.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya,2011)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PKM.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Bab 1 Pasal 2.

Riawan, Wawan Kusnawan, "Pengaruh Modal Sendiri Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM Di Desa Platihan Kidul Kec. Siman), *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19 No.1 (2018)

Setyawan, 2017. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit*. Yogyakarta: Simki Economic

Undang undang Republik indonesia No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil dan menengah pasal 6 poin 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 4 Pasal 6 Poin 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1 Poin 2.

Wawancara Pribadi dengan Muhamad Riza, Mantri BRI Unit Way Halim. Bandar Lampung. 07 Februari 2023